



## Daftar Pustaka

Daftar Bagan	vii
Daftar Tabel	viii
Kata Pengantar	1
Abstrak	2
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>2</b>
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Pertanyaan Penelitian	13
1.3. Tujuan Penelitian.	14
1.4. Manfaat Penelitian	15
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>16</b>
2.1. Aktor Kebijakan, Analisis Interseksional dan Stakeholder Mapping dalam Tahap Formulasi Kebijakan	17
2.1.1. Formulasi Kebijakan	17
2.1.2 Aktor Kebijakan dan Analisis Interseksional	19
Teori Interseksionalitas Gender	19
2.1.3. Stakeholder Mapping	21
2.2. Komunikasi Politik Abdurrahman Wahid	26
2.3. Kesetaraan Gender di Indonesia	29
2.4. Kerangka Berpikir	36
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN</b>	<b>38</b>
3.1. Jenis Penelitian	38
3.2. Jenis Data	39
3.3. Teknik Pengumpulan Data	40
3.4. Data yang dibutuhkan	45
3.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	50
<b>BAB 4 Pemikiran dan Sikap Abdurrahman Wahid terkait Kesetaraan Gender di Tengah Diskriminasi Perempuan Era Orde Baru</b>	<b>51</b>
4.1. KOWANI: Wujud Kekangan Orba terhadap Gerakan Perempuan	53
4.2. Dharma Wanita	56
4.3. PKK: Doktrin Orba ke Unit Keluarga	57
4.4. Produk Hukum Diskriminasi Gender Era Soeharto	61



4.5. Sumber Pemikiran dan Sikap Abdurrahman Wahid terkait Kesetaraan Gender	65
4.5.1. Keluarga Abdurrahman Wahid Merubah Posisi Perempuan di Ranah Pesantren	66
4.5.2 Abdurrahman Wahid dikelilingi Aktivistis	68
4.6. Mitra Seajar Perempuan dan Laki-Laki	72
4.7. Perempuan di Ranah Publik	76
4.8. Inteseksional Abdurrahman Wahid	80
4.9. Kritik Abdurrahman Wahid terhadap Gerakan Feminis Tahun 1990-an	82
4.10. Reformasi 98: Pergantian Presiden Tidak dengan Bergantinya Iklim Pemerintahan	87
<b>BAB 5 Pemetaan Aktor dan Komunikasi Politik Kebijakan Kesetaraan Gender Periode Presiden Abdurrahman Wahid Tahun 1999-2001</b>	<b>90</b>
5.1. Pergantian Nama Kementerian Urusan Peranan Wanita menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan	93
5.1.1. Peran Presiden Abdurrahman Wahid dalam Perubahan Nama Kementerian	95
5.1.2. Peran Khofifah Indar Parawansa dalam Pergantian Nama Kementerian	99
5.1.3. Komunikasi Politik Abdurrahman Wahid dalam Perubahan Nama Kementerian Urusan Peranan Wanita menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan	103
5.2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender	104
5.2.1. Peran Kelompok Perempuan dalam Proses Rancangan Inpres Nomor 9 tahun 2000	108
5.2.2. Peran Presiden Abdurrahman Wahid dalam Kebijakan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000	114
5.2.3. Peran Khofifah Indar Parawansa sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan	120
5.2.4. Peran Lembaga Internasional dalam Inpres Pengarusutamaan Gender di Indonesia	127
5.2.5 Peran Kementerian dan Pemda dalam Implementasi Inpres Nomor 9 tahun 2000	129
5.2.6. Peran Tim Pengarusutamaan Gender dalam Implementasi Inpres Nomor 9 tahun 2000	133
5.2.7. Komunikasi Politik Abdurrahman Wahid dalam Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000	136
5.3 Penyelamatan buruh migran perempuan Siti Zaenab	142
5.3.1. Peran Presiden Abdurrahman Wahid dalam Penyelamatan Hukuman Mati Siti Zaenab	146
5.3.2. Peran Aktivistis Buruh dalam Penyelamatan Siti Zaenab	149
5.3.4. Peran Khofifah Indar Parawansa dalam Penyelamatan Siti Zaenab	151
5.3.5. Peran Raja Fahd dalam Diplomasi Siti Zaenab	152
<b>BAB 6 Kesimpulan dan Rekomendasi</b>	<b>160</b>
6.1. Kesimpulan	
6.2. Rekomendasi dan Pengembangan Penelitian	170
6.3. Rekomendasi Kebijakan	171



### Daftar Bagan

Bagan 1	24
Bagan 2	36
Bagan 3	53
Bagan 4	66
Bagan 5	93
Bagan 6	107
Bagan 7	145

### Daftar Tabel

Tabel 1	69
---------	----